

# RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (RLPPD) TAHUN 2024

## KATA PENGANTAR

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bahwa Gubernur selaku Kepala Daerah wajib menyampaikan RLPPD kepada masyarakat melalui media cetak/ media online.

Penyampaian RLPPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 ini merupakan salah satu bentuk transparansi penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kepada masyarakat agar dapat diperoleh saran dan masukan untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang lebih baik kedepannya.

Pangkalpinang, 31 Maret 2025

Pj. GUBERNUR

KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



SUGITO

## CAPAIAN KINERJA MAKRO

**Indeks Pembangunan manusia**  
74,55 Poin (meningkat 0,621% dibandingkan tahun 2023)

**Angka Kemiskinan**  
4,55 % (meningkat 0,664% dibandingkan tahun 2023)

**Angka Pengangguran**  
4,63 % (meningkat 1,535% dibandingkan tahun 2023)

**Pertumbuhan Ekonomi**  
0,77 % (menurun 82,42% dibandingkan tahun 2023)

**Pendapatan Per Kapita**  
70,19 Jt/Th (meningkat 3,511% dibandingkan tahun 2023)

**Ketimpangan Pendapatan**  
0,244 (menurun 0,408% dibandingkan tahun 2023)

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

## OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN SEBELUMNYA

BPK RI memberi Opini atas Laporan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 Wajar Tanpa pengecualian (WTP).

Sejak Tahun 2017 s.d. 2023 Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah mendapatkan Opini BPK 7 kali "WTP".

## RINGKASAN CAPAIAN KINERJA URUSAN PELAYANAN DASAR

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja
1	2	3	4
1	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	68,85
		Tingkat partisipasi warga negara usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus	29,73
2	Kesehatan	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	172
		Persentase RS Rujukan provinsi yang terakreditasi	100
		Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	100
		Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB provinsi	100
3	Pekerjaan Umum	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	5,98
		Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan provinsi	0
		Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi	59,39
		Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota	0
		Rasio pelayanan pengolahan limbah domestik oleh SPAL Regional	0
		Rasio kemandapan jalan	93,03
		Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	65,82
4	Perumahan Rakyat	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	0
		Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	0
		Persentase Luas kawasan kumuh 10 - 15 Ha yang ditangani	3,60
		Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU	85,61
5	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100
		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	50
		Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	100
		Persentase penanganan pra bencana	100
6	Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100
		Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100
		Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100
		Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100
		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	100

# RINGKASAN REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN ANGGARAN DAERAH

Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2024:

## 2,39 T

Realisasi Belanja Daerah Tahun 2024:

## 2,41 T

### FORMAT MASUKAN/SARAN:

Kolom Penyampaian Saran dan Masukan dari Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024

Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 disampaikan saran/masukan sebagai berikut:

1.....

2.....

3.....

Demikian disampaikan untuk kemajuan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Tanda Tangan>Nama

Catatan:

Saran/masukan dapat dikirim melalui:

✉ otdababel@yahoo.com

📍 Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

## INOVASI DAERAH

Daftar Inovasi Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam Index Government Award Tahun 2024 :

NO.	NAMA INOVASI DAERAH	BENTUK INOVASI DAERAH
1.	TULAR NON SUBSIDI (KARTU SOLAR)	Inovasi pelayanan public/ Digitalisasi Layanan Pemerintahan
2.	TERASI (LAYANAN PORTAL SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TERINTEGRASI)	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah/ Digitalisasi Layanan Pemerintahan
3.	SIMPEL (SISTEM PELAPORAN PRODUKSI DAN PENJUALAN MINERAL SECARA ELEKTRONIK)	Inovasi pelayanan public/ Kemudahan Investasi
4.	Optimalisasi Penggunaan Google Sites untuk Inovasi Pembelajaran Digital Berbasis Google Workspace for Education dan Wadah Transformasi Digital dengan WebApps "SekolahKu"	Inovasi pelayanan public/ Non Tematik
5.	SIMENTARI (SISTEM MONITORING MANAJEMEN RISIKO TERINTEGRASI)	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah/ Digitalisasi Layanan Pemerintahan
6.	SIHAWA (SISTEM SKRINING KESEHATAN JIWA)	Inovasi pelayanan public/ Digitalisasi Layanan Pemerintahan
7.	SIDUMA (SISTEM INFORMASI TERPADU DASAWISMA)	Inovasi pelayanan public/ Non Tematik
8.	SI TAWAS (APLIKASI MATA PENGAWAS PERIKANAN)	Inovasi pelayanan public/ Digitalisasi Layanan Pemerintahan
9.	SI PAPA (SISTEM INFORMASI PAJAK AIR PERMUKAAN)	Inovasi pelayanan public/ Digitalisasi Layanan Pemerintahan
10.	Pendataan UMKM SI DULANG BABEL (SISTEM INFORMASI DATA TUNGGAL UMKM BERDAYA DAN BERKEMBANG)	Inovasi pelayanan public/ Digitalisasi Layanan Pemerintahan
11.	SATU JIWA (PELAYANAN KESEHATAN JIWA BERKELANJUTAN)	Inovasi pelayanan public/ Non Tematik
12.	APLIKASI PRIMADONA	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah/ Non Tematik
13.	PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA DIGITAL (PERIBANTAL)	Inovasi pelayanan public/ Digitalisasi Layanan Pemerintahan
14.	MOLIN SAHABAT (MOBIL PERLINDUNGAN SATU HATI UNTUK SEMUA KERABAT)	Inovasi pelayanan public/ Non Tematik
15.	MENTILIN (MANAJEMEN ARSITEKTUR DAN PETA RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK)	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah/ Digitalisasi Layanan Pemerintahan
16.	MATA BIRU (MAJELIS TA'LIM BINA RUHIYAH)	Inovasi pelayanan public/ Non Tematik
17.	KEMUNING CINTA (KEMUDAHAN AKSES UNTUK PENINGKATAN PEMANFAATAN KARTU IDENTITAS ANAK)	Inovasi pelayanan public/ Non Tematik
18.	LIMAS (LAYANAN INTERNET BERBASIS MAPS DAN BARCODE TERINTEGRASI)	Inovasi pelayanan public/ Digitalisasi Layanan Pemerintahan
19.	INI GAS KAN (INFOGRAFIS HARGA IKAN)	Inovasi pelayanan public/ Prioritas Aktual Presiden
20.	PENANGANAN ANAK TIDAK SEKOLAH MELALUI GERAKAN KEMBALI BERSEKOLAH (GEREBEK)	Inovasi pelayanan public/ Digitalisasi Layanan Pemerintahan
21.	AIK Kelekek (Pengelolaan Hutan untuk Pemberdayaan Masyarakat Bangka Belitung)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah